

# Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Koperasi Perguruan Tinggi (KPT) Mahasiswa

Asep Deni\*, Ari Riswanto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi

\*Korespondensi: [ayahmazan@gmail.com](mailto:ayahmazan@gmail.com)

## Abstract

*Accountability of financial management in micro, small and medium businesses must be carried out to see the extent to which the implementation of the accountability guidelines of the National Committee on Governance (KNKG) in institutions that use financial statements. This research was conducted on 4 student KPT (Student Cooperation) with qualitative descriptive methods through interviews to obtain primary data, while the profile and company reports were used as secondary data. The results showed that most of the KOPMA units had implemented accountability and each business unit had diversity in preparing financial statements.*

**Keywords:** *Accountability, Financial Management, Student Cooperation (KPT)*

## Abstrak

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada usaha mikro kecil menengah harus dilakukan guna melihat sejauh mana penerapan pedoman akuntabilitas Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada lembaga yang menggunakan laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada 4 Koperasi Perguruan Tinggi (KPT/ Koperasi mahasiswa) dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara untuk memperoleh data primer, adapun profil dan laporan perusahaan digunakan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar unit KPT telah menerapkan akuntabilitas dan masing-masing unit usaha memiliki keragaman dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

**Kata Kunci :** *Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Koperasi Mahasiswa (KPT/ Kopma)*

## A. PENDAHULUAN

Informasi menyangkut segala aktifitas yang berhubungan dengan transaksi pada masa yang lalu dan sangat bermanfaat dalam mendukung dalam penguatan keputusan menyangkut masa yang akan datang dihasilkan dari proses akuntansi. Hasil output dari kegiatan akuntansi itu adalah laporan keuangan. Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya (Kasmir, 2016). Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan". APB Statement No. 4 (AICPA) menggambarkan tujuan laporan keuangan dengan membagi dua yaitu 1) Tujuan umum: Menyediakan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima. 2) Tujuan khusus: Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan (Sofyan Syafri, 2016).

Selanjutnya Governance dapat diartikan sebagai suatu metode dalam mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan defenisi governance sebagai "the way state power is used in managing economic, and social resources for development of society". Sementara itu, United National Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai "the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels". Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada strategi pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan anggota, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara (Mardiasmo, 2009).

Dalam Komite Nasional Kebijakan Governace (KNKG, 2008), dalam hal ini (Good Corporate Governance) secara awam dapat diartikan dengan istilah mengurus

perusahaan secara baik. Bagaimana mengurus perusahaan secara baik? Di sinilah Good Governance berdasarkan KNKG mengajarkan prinsip-prinsipnya, diantaranya: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

Dilihat dari kacamata wacana good governance, tidak sedikit pihak yang mempertukarkan antara prinsip, unsur, elemen, dimensi, indikator, dan karakteristik tetapi memiliki makna dan pengertian yang sama. Pedoman Umum Good Governance (KNKG) menyatakan bahwa secara umum ada beberapa karakteristik yang melekat dalam praktik good governance.

Pertama, praktik good governance menuntut keleluasaan kepada pihak diluar penyelenggara untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. Kedua, dalam praktiknya, good governance memiliki nilai-nilai yang membuat penyelenggara negara, pelaku usaha maupun anggota pada umumnya dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, selanjutnya pada praktiknya, good governance merupakan praktik penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu praktik penyelenggaraan negara dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, budaya hukum, dan akuntabilitas publik.

Terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik, yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik dan value money (Mardiasmo, 2009). Pedoman pokok pelaksanaan akuntabilitas yang diberikan Komite Nasional Kebijakan Governance sebagai upaya untuk melaksanakan akuntabilitas, diantaranya: 1) Perusahaan/ organisasi harus meyakini bahwa semua organ dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya. 2) Perusahaan/ organisasi harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan/ organisasi. 3) Perusahaan/ organisasi harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan/ organisasi yang konsisten dengan nilai-nilai, sasaran utama dan strategi, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment system (KNKG, 2008).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ dan semua karyawan harus berpegang pada pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, adapun deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang, pada waktu penelitian berlangsung (Nasution, 2006). Selanjutnya penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang secara alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007). Adapun sampel penelitian ini digunakan sebanyak empat KPT mahasiswa yang ada di Sukabumi.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di Koperasi Perguruan Tinggi (KPT) serta penerapan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di KPT. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bertempat di empat Perguruan Tinggi Swasta di Sukabumi. Informan yang dipilih

peneliti adalah informan yang dinilai mengerti dan memahami serta terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan di masing-masing KPT.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan KPT lebih terdefinisi kearah terbuka terhadap anggota secara keseluruhan dengan mengungkapkan berapa dan darimana dana KPT didapatkan dan untuk apa dan berapa dana yang dikeluarkan oleh KPT. Dalam hal mengelola keuangan KPT pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan pengelolaan lembaga keuangan yang lain, yaitu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) secara periodik kepada segenap jajaran pengurus dan anggota KPT. Demikian pula agar anggota puas dan senang membayar iuran, sebaiknya laporan penerimaan dan pengeluaran laporkan secara rutin dan terbuka (transparansi) kepada seluruh anggota.

KPT adalah organisasi yang mengelola harta benda yang didapatkan dari dana anggota baik berupa simpanan wajib, simpanan sukarela yang digunakan untuk kesejahteraan dan kemajuan KPT, tidak untuk kepentingan pribadi pengelolaanya. Berdasarkan hasil penelitian terhadap hasil wawancara, para informan telah mengungkapkan penerapan transparansi KPTnya, dimana di dalam KPT ketransparansian dalam pengelolaan keuangan merupakan hal wajib berupa suatu keharusan. Kemana uang itu digunakan, harus jelas pertanggungjawabannya. Karena KPT telah menggunakan dana amanat untuk biaya operasionalnya, sudah seharusnya KPT transparan mengenai laporan keuangan yang dikelolanya.

Upaya-upaya transparansi yang dilakukan oleh Koperasi Perguruan Tinggi telah sesuai dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan transparansi kepada publik dilakukan dengan pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui temu wicara maupun media cetak maupun elektronik (Hamid Muhammad, 2007).

KPT sebagai organisasi, memiliki keterbatasan aturan, bisnis yang dilakukan organisasi nirlaba tidak memiliki pilihan seperti halnya organisasi yang mencari laba. Tujuan utama bisnis organisasi nirlaba adalah menyediakan jasa kepada anggota sekitar bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Oleh karena itu, kepemilikan KPT merupakan milik beranggota, maka keterbukaan (transparansi) kepada publik dalam pengelolaan keuangan KPT menjadi suatu keharusan. Anggota berhak mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai status keuangan sebuah KPT. Dengan alasan ini, mewajibkan KPT untuk berperilaku transparan untuk meningkatkan kepercayaan publik karena dengan transparan, anggota akan lebih percaya kepada KPT untuk memberikan dana simpanan uang mereka.

Laporan keuangan merupakan cerminan atas penerapan transparansi dan akuntabilitas KPT, dengan adanya laporan keuangan anggota bisa mengetahui darimana dana berasal dan kemana dana disalurkan. Pada dasarnya setiap Koperasi Perguruan Tinggi telah mengeluarkan laporan keuangannya sebagai wujud transparansi dan akuntabilitasnya. Peneliti bisa simpulkan dari hasil wawancara para informan KPT bahwa laporan keuangan KPT bisa dilaporkan secara sistematis dan berupa tulisan pada publik dalam jangka waktu pendek dan/atau jangka waktu panjang. Tiap minggu, tiap bulan dan tiap tahun pelaporan keuangan KPT bisa dilakukan sehingga anggota bisa mengetahui penerimaan dan pengeluaran dana pada KPT pada kurun waktu tersebut.

### **Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Koperasi Perguruan Tinggi**

Pengelolaan keuangan KPT yang baik harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu

dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil.

Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang KPT dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak KPT membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada anggota dan pemerintah. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas ini, penetapan mekanisme pemeriksaan sangat penting dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemegang amanah benar-benar dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan bahwa KPT telah akuntabel, penelitian terhadap akuntabilitas akan didasari oleh penerapan pokok pelaksanaan akuntabilitas menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

### **Kejelasan Fungsi dan Pertanggungjawaban**

Akuntabilitas merupakan kewajiban perorangan atau organisasi untuk menuntaskan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan program yang telah diamanatkan. Para pengelola KPT harus profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Dengan adanya struktur organisasi menuntut adanya pertanggungjawaban dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang tertinggi, sehingga akan ada pemisahan fungsi dan pembagian tugas masing-masing individu pengelola KPT demi mencapainya efektif dan efisiennya suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Anton bahwa : “dengan adanya struktur organisasi akan ada pemisahan fungsi dan pembagian tugas masing-masing individu pengelola KPT. Susunan dan hubungan tiap bagian secara posisi yang ada pada struktur akan menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.”

Dengan pemisahan fungsi dan pembagian tugas akan lebih terlihat pertanggungjawaban masing-masing individu sebagai pengemban jabatan, Anton Mulyo menambahkan: “Memang pada gilirannya sudah menjadi bagian dari tanggungjawab, walau disini kepengurusannya berasal dari pemilihan tapi dalam kegiatan yang dilaksanakan, sampai saat ini sudah melaksanakan kinerjanya sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing, sesuai dengan jabatannya dalam struktur organisasi, karyawan yang bekerja pun secara profesional melaksanakan kinerjanya sesuai kewajibannya”. Menanggapi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota dalam organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada pedoman perilaku yang telah disepakati, Anton Mulyo menambahkan: “Betul, aturan yang tertulis guna mengatur berjalannya organisasi.”

Sejalan yang diungkapkan oleh Anton, Alimah Jaya juga mengatakan hal yang sama mengenai terkait dengan tugas dan tanggung jawab: “semua bagian yang ada memiliki kapasitas sesuai bidangnya dan melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab, dan perannya dalam pengelolaan KPT, secara keseluruhan KPT yang dipimpin Alimah memiliki pekerja yang sudah bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan memiliki *job desk*, yang mengikat.”

Walaupun terkadang ada pekerja atau petugas baru masuk dan belum mengetahui tugas sesuai bidangnya, maka Alimah menambahkan: “petugas baru itu diberikan bimbingan oleh para petugas yang sudah mahir dan senior, artinya terdapat fungsi pembinaan dan pengembangan pada pekerja atau petugas yang masih baru”.

Berdasarkan hasil pengamatan, KPT ini dikelola oleh pengelola dengan latar belakang pendidikan tinggi dan dari bidang yang berbeda-beda. Namun, latar pendidikan tinggi yang dimiliki, tidaklah berarti apabila orang tersebut tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam KPT dengan bertanggung jawab, walaupun dalam hal ini memiliki keterlibatan mahasiswa dalam menjalankan kegiatannya. Yang terpenting dalam kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dalam KPT adalah akuntabilitas terhadap fungsi, tugas dan peran yang diberikan pada masing-masing pengelola khususnya dalam pengelolaan keuangan dimana KPT mengemban dana anggota yang wajib dipergunakan untuk mensejahterakan KPT dan anggota.

Berdasarkan hasil reduksi, seluruh informan meyakini bahwa semua organ dan pengelola-pengelola KPT mempunyai kemampuan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan KPT khususnya pada bagian keuangan KPT, meskipun para pengelola keuangan KPT bukan lulusan jurusan ekonomi atau keuangan. Tetapi mereka telah berusaha untuk mampu memenuhi tanggungjawabnya sebagai pengembal amanah. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya setiap pengelola KPT telah berpegang pada peranan yang diberikan kepadanya, dengan adanya struktur organisasi menuntut adanya pertanggungjawaban dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang tertinggi sesuai susunan dan hubungan tiap pengelola KPT pada bagian secara posisi yang ada pada struktur untuk menjalin kegiatan operasional, sehingga akan ada pemisahan fungsi dan pembagian tugas masing-masing individu pengelola KPT demi mencapainya efektif dan efisiennya suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, sudah tampak kesesuaian antara pernyataan informan yang terlibat dengan dengan pokok pelaksanaan akuntabilitas menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang menyatakan bahwa organisasi harus meyakini bahwa semua organ dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Governance* dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ dan semua karyawan harus berpegang pada pedoman perilaku dan aturan yang telah disepakati, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap pengelola KPT telah berpegang pada aturan seperti *job desk*, prosedur, dan struktur organisasinya masing-masing telah disepakati dengan dilandasi kejujuran.

Peneliti sependapat dengan pernyataan responden bahwa sebagai pengelola KPT sudah seharusnya memiliki moral yang baik dengan melakukan praktik-praktik sehat (akuntabilitas moral) dalam pengelolaan KPT dengan bersikap jujur, menghindari proses-proses yang mengacu kearah praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Lalu menyangkut pengelolaan keuangan, pengelola KPT harus mengetahui cara dana dikelola dengan baik dengan proses pelaporan yang baik pula (akuntabilitas profesional). KPT adalah milik anggota bersama, mengelola KPT merupakan amanah anggota, dimana aset KPT harus digunakan sesuai dengan fungsi dan yang seharusnya, bisa diakses oleh anggota tidak untuk kepentingan pribadi pengelola KPT.

Kejelasan fungsi dan cara mempertanggungjawabkannya diperlukan agar setiap lembaga dan penyelenggara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap penyelenggara harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan wewenang (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2008).

### **Pentingnya Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan KPT**

Pengawasan merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen. Dengan pengawasan akan menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai

waktunya. Mungkin sebagian orang berfikir seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh KPT dan siapa pengawasnya. Dengan adanya pengawasan didalam KPT tentu akan berimbas pada kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan KPT, karena tata kelola keuangan akan lebih terarah dan menyebabkan hasil yang lebih baik dibandingkan hal yang tidak diawasi.

Fungsi pengawasan adalah fungsi yang sangat penting dan sangat menentukan dalam pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dijalankan dengan baik. Pengawasan/pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Seperti halnya perusahaan, pengelolaan di dalam KPT khususnya pengelolaan keuangan perlu adanya pengawasan, meskipun dari hasil penelitian masing-masing memiliki pengawas yang berbeda sesuai struktur organisasi masing-masing KPT, tetapi setiap KPT akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan KPT supaya menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan sistem pengendalian internal yang efektif.

Masing-masing pengawasan pada setiap Koperasi Perguruan Tinggi berbeda-beda. Pengawasan dalam KPT dilakukan berdasarkan struktur organisasi di dalam KPT. Sebagaimana pengawasan yang dilakukan oleh salah satu KPT yang menjadi: "Pengawasan dilakukan sesuai struktur organisasi, dimana ada pembina dan diantara Pembina dan pengurus terdapat pengawas, nah nanti pengawas itu punya badan, salah satu system yang mengatur, Satuan Pengendali Internal"

Di KPT, adanya pengawasan di dalam pengelolaan keuangan adalah penting adanya. Dimana pengawas ini akan mengawasi berjalannya segala aktivitas yang dilaksanakan oleh KPT yang mengacu pada kebijakan umum dan kebijakan khusus dan tata laksana organisasi serta memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas dengan membentuk Satuan Pengendali Internal (SPI). Anggaran KPT Salman pun akan dikontrol oleh SPI sebagaimana yang ditambahkan oleh Alimah, berikut ini: "Anggaran juga dikontrol oleh SPI. Bagian verifikasi anggaran dilakukan oleh SPI dan anggaran sendiri paling sedikit diketahui minimal oleh dua orang, yaitu Ketua dan Bendahara."

Pengawasan di dalam KPT harus dilakukan karena merupakan salah satu tugas dari manajemen. Sebagai ketua KPT juga perlu melakukan pengawasan. Berikut pernyataan dari Anton mengenai pentingnya pengawasan: "Kegiatan kontrol jelas sangat perlu dilakukan karena salah satu fungsi manajemen, pengelola KPT bertugas merencanakan, melaksanakan berbagai kegiatan, dan juga yang penting melakukan pengontrolan mengenai berapa pemasukan berapa pengeluaran. Sebagai ketua, saya juga perlu melakukan pengontrolan dengan cara komunikasi, misalnya, apabila bendahara mengeluarkan dana"

Dengan adanya pengawasan dalam pengelolaan keuangan KPT diharapkan KPT bisa lebih transparan dan akuntabel, karena sistem pengawasan akan membawa kepastian bahwa dana yang masuk digunakan sesuai dengan seharusnya dan memeriksa seluruh aktivitas keuangan yang ada di KPT itu sendiri apa sudah sesuai kebijakan dan prosedur yang ada. Dengan adanya pengawasan akan menghasilkan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan KPT untuk lebih baik. Seperti yang dinyatakan Alimah berikut ini: "dengan adanya pengawasan, akan ada evaluasi lalu merancang lagi, lalu dilaksanakan, lalu kembali evaluasi, merancang dan melaksanakan serta berusaha untuk lebih baik lagi."

### **Ukuran Kinerja untuk Pengelolaan KPT**

Whittaker (dalam BPKP, 2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan

keputusan dan akuntabilitas. Simons (dalam BPKP, 2000) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Meningkatnya kesadaran anggota terhadap pengelolaan administrasi publik memicu timbulnya tuntutan yang semakin tinggi terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh pengelola atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para pengelola yang telah menerima amanat dari anggota. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja bisa dijadikan alat untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Dengan adanya pengukuran kinerja setiap pengelola, maka akan menilai mana pengelola dengan kinerja yang baik dan pengelola dengan kinerja yang buruk. Untuk menanggapi penilaian tersebut maka muncullah sistem penghargaan dan sanksi untuk para pengelola. Dalam mengukur kinerja tentu dibutuhkan ukuran kinerja untuk menjadi patokan apakah sudah baik atau buruk.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pada masing-masing KPT, secara keseluruhan informan memberikan jawaban negatif atas keberadaan ukuran kinerja di dalam KPT, seperti yang dinyatakan Alimah Jaya bahwa, "Pengukuran kinerja lebih secara keseluruhan masuk ke pengawasan saja. (Sistem penghargaan dan sanksi) sanksi teguran berupa lisan dan surat teguran satu, dua dan tiga hingga akhirnya pemecatan. Penghargaan untuk pengelola dengan kinerja yang baik belum ada tapi ada penghargaan untuk pengabdian pegawai yang sudah lama akan diberikan peningkatan honor dan bonus".

Jawaban serupapun muncul dari Agus Supriadi, sebagaimana berikut: "Dalam pengelolaan yang penting adanya sikap kejujuran para pengurus KPT dalam mempertanggungjawabkan masing-masing tugasnya. Pada prinsipnya jika kamu tidak jujur, semua anggota akan menurunkan anda bahkan mengeluarkan anda dari organisasi. Sampai sekarang yang saya rasakan, semua pengurus dan anggota bekerja sesuai fungsinya di KPT. Jujur dan berusaha melakukan penilaian serta senantiasa melakukan introspeksi secara masing-masing saja."

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan KPT Mahasiswa", maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: Tidak ada hubungan pengelolaan keuangan KPT dengan kampus yang menaunginya, KPT hanya melaporkan laporan keuangannya ke Kampus sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas keberadaan KPT di lingkungan kampus. Pengelolaan keuangan Koperasi Perguruan Tinggi bisa berkaitan dengan pengelolaan keuangan di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Selanjutnya, sumber keuangan KPT berasal dari simpanan anggota. Metode akuntansi yang digunakan KPT masih dominan menggunakan basis kas. Laporan keuangan yang dikeluarkan KPT mempunyai format yang berbeda-beda.

Penyajian informasi keuangan KPT sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dominan dilakukan dengan menempelkan hasil laporan pada papan informasi dan diumumkan pada seluruh anggota. Di dalam KPT belum terdapat ukuran kinerja secara

khusus untuk mengukur kinerja para pengelolanya, dan belum mempunyai sistem penghargaan dan sanksi untuk hasil kinerja para pengelolanya, namun pengukuran kinerja masih terfokus kinerja total pengurus dan anggota KPT dan secara keseluruhan KPT telah menjalani pokok pelaksanaan akuntabilitas menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* diantaranya, KPT telah meyakini bahwa semua organ dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Governance*, memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan usaha, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpegang pada pedoman perilaku yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas laporan keuangan, peneliti memberikan saran sebagai berikut: Bagi Koperasi Perguruan Tinggi untuk lebih meningkatkan transparansi keuangan, dengan melaporkan laporan keuangannya secara merata, sehingga lebih banyak orang yang bisa mengakses laporan keuangan KPT. Bagi mahasiswa, hendaknya mau untuk bertanya mengenai ketransparansian pengelolaan keuangan, dengan menemui pihak KPT dan memberikan pendapatnya dan saran pada KPT untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas KPTnya. Dan sebaiknya pihak KPT mau untuk menampung pendapat dan saran mereka sebagai koreksi bagi KPT untuk lebih baik lagi. Bagi penelitian selanjutnya, untuk mengadakan penelitian lebih lanjut untuk melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya dengan jumlah Koperasi Perguruan Tinggi yang dijadikan sebagai populasi penelitian meliputi perguruan tinggi swasta yang lebih luas, bahkan sampai ke perguruan tinggi negeri dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda. Dan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut guna mengetahui sistem pengukuran kinerja pada KPT yang lebih khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamid Muhammad. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta, lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Harahap, Sofyan Syafri. 2016. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers Cetakan: Ke-13
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2008. *Pedoman Umum GCG*. Indonesia, Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Pers).
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Nasution. 2006. *Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif*. Bandung: Tarsito.